

**VOTING BEHAVIOR PEMILIH PEMULA DALAM PEMILU 2004 DAN
PEMILIHAN KEPALA DAERAH SECARA LANGSUNG DI PROVINSI
SUMATERA BARAT**

(Studi Di Kota Padang Dan Kabupaten Limapuluh Kota)

Oleh :

Hendri Koeswara, Tengku Rika Valentina

Nomor Kontrak: 005/SP3/PP/DP2M/II/2006

ABSTRAK

Di Indonesia, pemilihan umum telah dilaksanakan sebanyak sembilan kali. Pemilu pertama kali dilaksanakan pada tahun 1955 yang dilakukan untuk memilih anggota parlemen dan anggota konstituante. Pemilu pertama untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ini menghasilkan 4 partai besar yang mendominasi parlemen dan konstituante, yaitu Masyumi, Partai Nasional Indonesia (PNI), Nahdhatul Ulama (NU), serta Partai Komunis Indonesia (PKI). Pemilu terakhir yang dilaksanakan adalah pemilu 2004 yang lalu, dimana pemilu ini menggunakan sistem dan cara yang sangat jauh berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya, selain memilih anggota DPR, DPRD Propinsi, DPRD Kabupaten/Kota, pemilu ini juga memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang terdiri dari 4 orang dari tiap-tiap propinsi serta memilih Presiden secara langsung.

Hasil pemilu yang mengalami perubahan yang signifikan ini berdasarkan penelitian dari IFES (International Foundation for Election Systems) bekerja sama dengan Polling Center KPU dikarenakan meningkatnya pengetahuan pemilih mengenai proses pemilu dan pengetahuan pemilih dalam memilih calon-calon yang akan mereka pilih. Hal ini tidak terlalu jauh berbeda dengan hasil penelitian yang dikeluarkan oleh tim peneliti LP2P LIPI yang menyebutkan bahwa kesiapan masyarakat pedesaan dalam menghadapi pemilu baik itu legislatif dan pemilu presiden sudah semakin baik, dimana LP2P LIPI menyebutkan bahwa walaupun pengetahuan kognitif pemilih masih kurang tapi informasi yang mereka dapatkan secara "tidak sengaja" di televisi menjadi faktor utama pemilih memberikan pilihan politiknya. Faktor lain yang mungkin tidak bisa diabaikan adalah besarnya jumlah pemilih pemula yang mengikuti pemilu saat ini. Data KPU menunjukkan bahwa, dari 147,219 juta pemilih yang berhak memilih, sekitar 27 juta atau 20% adalah pemilih yang memilih untuk pertama kalinya atau hampir setara dengan 80 kursi DPR. Jadi, peneliti melihat faktor pemilih pemula ini menjadi salah satu faktor yang menyebabkan kenapa terjadi perubahan-perubahan pada pemilu 2004 ini. Ketidakberdayaan daerah dalam mengembangkan prakarsa dan kreativitas sendiri sesuai dengan potensi dan aspirasi masyarakat, juga merupakan hasil dari tatanan sistem yang sentralistik yang dikembangkan sebelum ditetapkan UU No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah.